



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SANGGAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perhubungan Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:
  - a. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 5

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pengujian pertama kendaraan bermotor;
- e. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. melaksanakan pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- g. melaksanakan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- h. pengelolaan terhadap penerimaan dan pendapatan daerah dari bidang pengujian kendaraan bermotor untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- i. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi pengujian kendaraan bermotor; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pelayanan teknis dalam pengujian pertama kendaraan bermotor, pengujian berkala kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

#### Bagian Kedua Rincian Tugas

##### Paragraf 1

#### Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 7

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pengujian kendaraan bermotor dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber dana yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan rencana kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor agar hasil kerja sesuai standar.
- c. memeriksa hasil kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja.
- d. menilai prestasi kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengujian pertama kendaraan bermotor;
- f. mengkoordinir pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- g. mengkoordinir pelaksanaan pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- i. mengkoordinir pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi dari kegiatan pengujian yang dilakukan sebagai bagian dari pendapatan asli daerah;
- j. mengajukan saran atau pertimbangan atasan melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas untuk mengambil keputusan;

- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB IX ESELONERING

### Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pejabat yang ada pada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

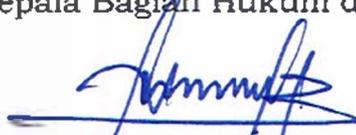
Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM



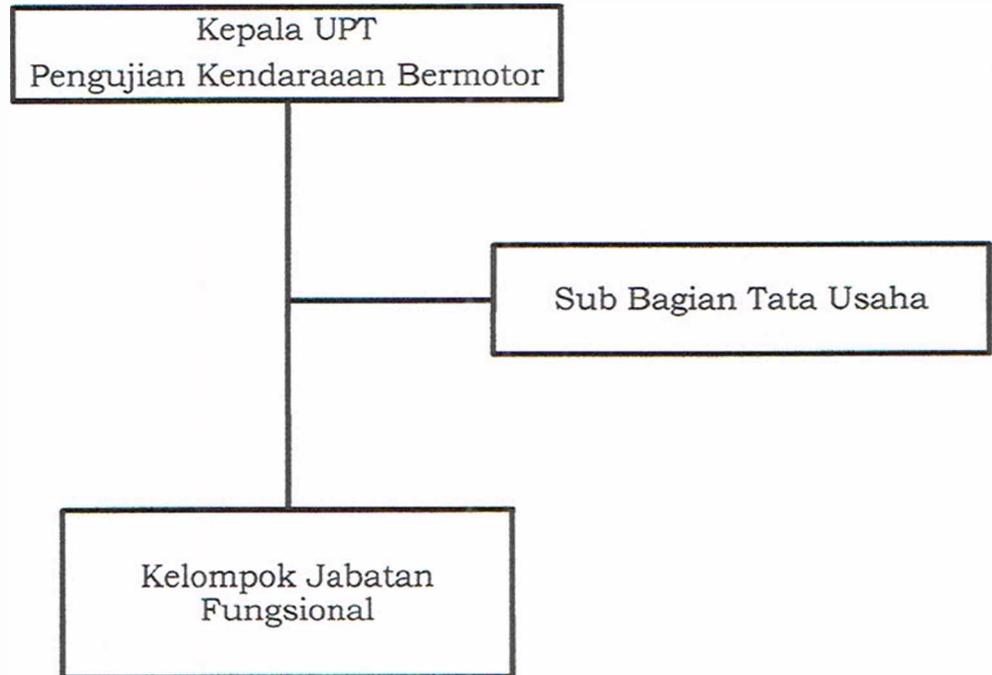
YAKOBUS/S.H., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 58 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, S.H., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002